KLIPPING BERITA MEDIA MASSA

Sabtu-Senin, 27-29 April 2019

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas (Halaman Utama)	Sabtu, 27 April 2019	23 Kerja Sama Segera Diwujudkan	Sebanyak 23 proyek kerja sama antara Indonesia dan China segera direalisasikan menyusul penandatanganan nota kesepahaman di antara pengusaha dari kedua negara di Beijing, China, Jumat (26/4/2018). Pelaksanaan proyek yang masuk dalam skema Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) itu disebutkan tidak menimbulkan utang baru karena kerja sama dilakukan antara perusahaan Indonesia dan China.
2	Kompas (Halaman, 11)	Sabtu, 27 April 2019	Banjir Genangi Jalan Tol	Hujan deras dan luapan air dari sejumlah sungai membuat banjir menggenangi permukiman dan jalan serta merusak fasilitas umum di Jakarta dan sekitarnya.
3	Kompas (Halaman, 14)	Sabtu, 27 April 2019	Harga Rumah Subsidi Ditunggu	Pemerintah memastikan aturan mengenai harga rumah subsidi tahun 2019 segera terbit. Pemerintah berharap pengembang tetap membangun rumah subsidi yang dibutuhkan masyarakat.
4	Media Indonesia (Halaman, 8)	Sabtu, 27 April 2019	Belt & Road dan Masa Depan Tiongkok - Indonesia	Mewakili Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat ini sedang memimpin delegasi tingkat tinggi Indonesia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-2 Belt and Road Forum (B&R) yang digelar di Beijing Tiongkok. KTT B&R ini dihadiri ribuan delegasi dan setidaknya 150 negara dan 90 organisasi internasional. KTT ini bertujuan membahas masterplan pembangunan dalam kerangka Inisiatif B&R (Inisiatif Sabuk dan Jalan) demi menciptakan cetak biru kerja sama yang ideal dan menguntungkan bagi semua pihak.
5	Bisnis Indonesia (Halaman, 4)	Sabtu, 27 April 2019	23 Proyek OBOR Diteken	Para pebisnis Indonesia dan China akhirnya meneken 23 kesepakatan kerja sama di berbagai sektor usaha. Ini menandai dimulainya proyek One Belt One Road (OBOR) di Tanah Air.
6	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)	Sabtu, 27 April 2019	Kementerian PUPR Evaluasi Konstruksi Gedung di Jakarta	Kementerian PUPR membentuk komite keselamatan konstruksi untuk mengevaluasi gedung-gedun di Jakarta, yang selanjutnya juga akan menjadi percontohan bagi kota-kota lain. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk pertama kalinya Kementerian PUPR membentuk komite keselamatan konstruksi untuk gedung-gedung di Ibu Kota yang telah melakukan pengamatan sejak Februari 2019-April 2019.
7	Kompas (Halaman, 8)	Minggu, 28 April 2019	Berita Foto	Bendungan Batujai, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, saat [enuh dengan stovk cadangan air baku, Sabtu (27/4/2019), Selain difungsikan sebagai penampung cadangan air, bendungan tersebut juga akan dikembangkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai tempat wisata dengan konsep danau untuk menarik wisatawan.
8	Media Indonesia (Halaman, 4)	Minggu, 28 April 2019	Anies Andalkan Waduk Atasu Banjir	Waduk memang dapat menuntaskan problem banjir di Jakarta, tetapi membebaskan sungai dari penyempitan dan tumpukan sampah tidak kalah pentingnya. Bukannya segera memberesi sungai-sungai yang kian sempit dan dipadati sampah sehingga menimbulkan banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malah mengandalkan dua waduk di Bogor untuk menyelamatkan Jakarta dan wilayah sekitarna dari banjir.
9	Media Indonesia (Halaman Utama)	Senin, 29 April 2019	Berita Foto	Terendam Banjir: Foto dari udara kendaraan melintasi kawasan yang terndam banjir di kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bengkulu, Sabtu (27/4).
10	Kompas (Halaman Utama)	Senin, 29 April 2019	Berita Foto	Banjir meredam sejumlah wilayah di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Minggu (28/4/2019). Menurut pemerintah provinsi Bengkulu, setidaknya 17 orang meninggal dan 9 warga hilang akibat banjir dan longsor. Kerugian akibat kerusakan infrastruktur diperkirakan mencapai Rp 138 miliar.
11	Kompas (Halaman, 13)	Senin, 29 April 2019	Pangan untuk Kota	Ketika kota tumbuh makin besar, satu hal yang tak boleh dilupakan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan perut warganya. Selain tata ruang wilayah, perkembangan kota yang semakin pesar mengubah konfigurasi lingkungan, sosial, dan

				ekonomi, termasuk urusan pangan dan gizi penduduknya.
12	Kompas (Halaman, 14)	Senin, 29 April 2019	Investasi ke Luar Negeri Perkuat Kemitraan	Indonesia dinilai perlu memiliki kebijakan terkait investasi ke luar negeri. Selain bermanfaat bagi kepentingan nasional, investasi di luar negeri juga berpotensi meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara mitra.
13	Kompas (Halaman, 24)	Senin, 29 April 2019	Kali Malang, Penanda Perubahan Peradaban	Sejak diresmikan Pejabat Presiden Soeharto pada 26 Agustus 1967, Kali Malang menjadi saksi sejarah perubahan peradaban di Kora Bekasi, Jawa Barat. Kini, kali sepanjang 71 kilometer itu tengah menanti perubahan. Berbeda dari sungai alarm di Jawa Barat yang mengalir dari selatan ke utara atau sebaliknya, Kali Malang mengalir dari timur ke barat. Kali buatan itu mengalir memalang sejumlah sungai alam, seperti sungai cirata, sungai Bekasi, dan Sungai Cakung.
14	Koran Tempo (Halaman, 17)	Senin, 29 April 2019	Balai Besar: Percepat Pembangunan Waduk dan Normalisasi Sungai	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat untuk melanjutkan sejumlah program penanganan banjir di Ibu Kota. Berdasarkan pemetaan Balai, banjir yang melanda lebih dari 13 wilayah di Jakarta pada jumat lalu terjadi di kawasan yang dilintasi sungai yang belum dinormalisasi.
15	Koran Tempo (Halaman, 18)	Senin, 29 April 2019	Masalah Pembebasan Lahan Hambat Proyek Waduk di Hulu Ciliwung	Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengungkapkan lambannya pembebasan lahan untuk proyek waduk kering di Sukamahi dan Ciawi menghambat penuntasan proyek pengendalian banjir itu. Padahal pembangunan waduk yang dimulai sejak akhir 2017 tersebut seharusnya rampung pada akhir tahun ini.
16	Bisnis Indonesia (Halaman, 1)	Senin, 29 April 2019	Memotret Potensi Ekonomi di Pulau Sumatra	Pembangunan infrastruktur secara massif di berbagai wilayah diyakini akan membuka sumber-sumber perekonomian baru, salah satunya di Pulau Sumatra, wilayah paling barat Indonesia. Namun, potensi ekonomi ini belum terekam secara menyeluruh sehingga banyak pihak belum mengetahuinya. Oleh karena itu, sebagai media ekonomi terbesar di Tanah Air, Bisnis Indonesia menerjunkan Tim Jelajah Infrastruktur Sumatera 2019.
17	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)	Senin, 29 April 2019	META Susun Studi Kelayakan Proyek	PT Nusantara Infrastructure Tbk. Telah mendapat izin dari Kementerian PUPR untuk menyusun studi kelayakan pada ruas tol layang yang diprakarsainya yakni Cikunir – Ulujami.

Judul	**23 Kerja Sama Segera Diwujudkan**	Tanggal	Sabtu, 27 April 2019
Media	Kompas (Halaman Utama)		
Resume	Sebanyak 23 proyek kerja sama antara Indonesia dan China segera direalisasikan menyusul penandatanganan nota kesepahaman di antara pengusaha dari kedua negara di Beijing, China, Jumat (26/4/2018). Pelaksanaan proyek yang masuk dalam skema Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) itu disebutkan tidak menimbulkan utang baru karena kerja sama dilakukan antara perusahaan Indonesia dan China.		

23 Kerja Sama Segera Diwujudkan

Anita Yossihara
dari Beijing, China

BEIJING, KOMPAS — Sebanyak 23 proyek kerja sama antara Indonesia dan China segera direalisasikan menyusul penandatanganan nota kesepahaman di antara pengusaha dari kedua negara di Beijing, China, Jumat (26/4/2018). Pelaksanaan proyek yang masuk dalam skema Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) itu disebutkan tidak menimbulkan utang baru karena kerja sama dilakukan antara perusahaan Indonesia dan China.

Proyek kerja sama ditandatangani seusai pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-2 Prakarsa Sabuk dan Jalan yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut rencana, proyek kerja sama dilaksanakan di koridor Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku, dan Bali.

Sementara proyek kerja sama, antara lain, meliputi pembangunan kawasan industri serta infrastruktur penunjang di Tanah Kuning (Kalimantan Utara) dan pembangunan taman teknologi di Pulau Kura-kura (Bali). Total komitmen investasi dalam kerja sama antarpengusaha Indonesia-China itu mencapai 14,215 miliar dollar AS.

Wapres yang menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman mengharapkan seluruh kerja sama bisa segera direalisasikan. "Itu bukan hanya untuk seremonial, melainkan juga harus dilaksanakan secara baik dan konsisten dalam bentuk B to B (*business to business*)," katanya di hadapan sekitar 400 pengusaha RI dan China.

Turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman adalah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menristek dan Dikti M Nasir, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, serta Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun.

Tidak ada utang

Luhut menyatakan, tidak ada utang baru yang ditanggung negara dengan pelaksanaan proyek kerja sama itu di Indonesia. Kerja sama justru mendatangkan investasi dan lapangan kerja baru. "Kita tidak ada urusan dengan *debt* atau utang nasional karena sistem kerja samanya B to B," katanya.

Pemerintah Indonesia juga tetap selektif dalam memberikan izin usaha. Setidaknya ada lima syarat yang harus dipenuhi investor asing sebelum diizinkan menanamkan modal di Tanah Air. Syarat tersebut, antara lain, penggunaan sebanyak mungkin tenaga kerja lokal, adanya nilai tambah, kesediaan melakukan transfer teknologi, dan bersifat ramah lingkungan.

(Bersambung ke hlm 11 kol 6-7)

23 Kerja Sama

(Sambungan dari halaman 1)

Kalla juga mengingatkan para pengusaha bahwa prinsip penting yang harus diutamakan dalam kerja sama investasi adalah kesetaraan dan saling menguntungkan. Keputusan para pengusaha China untuk berinvestasi di Indonesia dinilainya tepat. Alasannya, seluruh kerja sama investasi RI-China selalu menguntungkan kedua belah pihak. Hal tersebut setidaknya terlihat dari tidak adanya keluhan dari para pengusaha China yang sudah terlebih dahulu menanamkan modal di Indonesia.

Dukungan

Dukungan sejumlah negara di Benua Eropa dan Amerika terhadap Prakarsa Sabuk dan Jalan terlihat dalam pertemuan puncak. Negara Eropa yang mengirimkan perwakilan ke KTT itu antara lain Inggris, Jerman, Perancis, dan Spanyol. Italia bahkan telah menjadi negara besar pertama di Uni Eropa yang ambil bagian dalam megaproyek Prakarsa Sabuk dan Jalan.

Presiden China Xi Jinping, saat membuka KTT, menyatakan, BRI harus sesuai dengan prinsip berkelanjutan dan menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas tinggi bagi semua orang. Untuk itu, pihaknya mengaku mematuhi konsep seperti keterbukaan, keberlanjutan, tahan risiko, dan penetapan harga yang wajar. (AFP/REUTERS/AYU/BEN)

Judul	**Banjir Genangi Jalan Tol**	Tanggal	Sabtu, 27 April 2019
Media	Kompas (Halaman, 11)		
Resume	Hujan deras dan luapan air dari sejumlah sungai membuat banjir menggenangi permukiman dan jalan serta merusak fasilitas umum di Jakarta dan sekitarnya.		

Banjir Genangi Jalan Tol

Hujan deras dan luapan air dari sejumlah sungai membuat banjir menggenangi permukiman dan jalan serta merusak fasilitas umum di Jakarta dan sekitarnya.

JAKARTA, KOMPAS — Hingga Jumat (26/4/2019) pukul 22.30, banjir masih melanda sejumlah lokasi di Jakarta dan sekitarnya, seperti di ruas Tol Bintaro-Serpong, Tangerang Selatan, Banten, tepatnya di Kilometer 06 hingga Kilometer 08+700. Kemacetan parah terjadi di kedua arah di tol itu akibat genangan air setinggi lebih kurang 50 cm.

Genangan di Jalan Arif Rahman Hakim dan Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, juga menyebabkan kemacetan panjang pada Jumat malam.

Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta M Ridwan mencatat, ada 32 titik banjir di Ibu Kota, kemarin. Selain merendam permukiman warga, luapan air Sungai Ciliwung juga memutus akses jalan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membangun lebih banyak waduk untuk mengurangi laju banjir ke Jakarta. "Kalau kita hanya membereskan di Jakarta, tidak ada artinya. Mengapa? Karena nanti kita akan berhadapan dengan permukaan laut yang lebih tinggi dari permukaan air sungai," ujarnya.

Saat ini sedang dibangun dua waduk di Kabupaten Bogor, Jabar, yaitu Sukamahi dan Ciawi. Keduanya diperkirakan rampung pada Desember 2019. Menurut Anies, kedua waduk itu bisa menurunkan atau mengurangi laju air banjir hingga 30 persen.

Ratusan keluarga

Meluapnya air Sungai Cisadane menyebabkan enam titik banjir di Kota Tangerang. "Ada 781 keluarga yang terdampak," kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.

Dinas Pendidikan Kota Tangerang mencatat, dua sekolah, yaitu SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 Panunggangan Barat, dilanda banjir hingga setinggi 1 meter. Sekolah pun diliburkan.

Luapan air Sungai Cisadane juga merendam 195 rumah di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Ketinggian air sekitar 1 meter.

Di Tangsel, luapan Sungai Cisadane merendam kawasan perumahan di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Serpong.

Arus deras Sungai Cikeas memutus Jembatan Cukang Inong di Kampung Cadas Ngampar, Desa Cijulang, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Kamis pukul 23.00. Sumiati (35), warga setempat, mengatakan, pohon besar dan rumpun bambu yang terbawa arus menabrak jembatan hingga putus.

Besi-besi runtuhan jembatan melintasi kawasan wisata Ah Poong, Sentul City. Lokasi wisata ini juga rusak diterjang arus Sungai Cikeas. Kemarin, tempat wisata tersebut ditutup.

Jembatan ambruk dan hanyut juga terjadi di Kampung Muara, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Jembatan di atas Sungai Ciliwung itu menghubungkan tiga desa, yakni Kopo, Cipayung Girang, dan Cipayung Datar.

"Enam sepeda motor hanyut," kata Salahudin Munandar (43), sukarelawan BPBD Desa Cikopo.

(HLN/PIN/RTS/DVD/GIO)

Judul	**Harga Rumah Subsidi Ditunggu**	Tanggal	Sabtu, 27 April 2019
Media	Kompas (Halaman, 14)		
Resume	Pemerintah memastikan aturan mengenai harga rumah subsidi tahun 2019 segera terbit. Pemerintah berharap pengembang tetap membangun rumah subsidi yang dibutuhkan masyarakat.		

Harga Rumah Subsidi Ditunggu

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan aturan mengenai harga rumah subsidi tahun 2019 segera terbit. Pemerintah berharap pengembang tetap membangun rumah subsidi yang dibutuhkan masyarakat.

"Aturannya sudah diharmonisasi, tinggal menunggu diterbitkan peraturan Menteri Keuangan-nya dan peraturan Menteri PUPR. Mudah-mudahan dalam waktu dekat terbit," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid, Jumat (26/4/2019), di Jakarta.

Selama aturan mengenai harga rumah subsidi belum terbit, pemerintah memberlakukan harga rumah subsidi 2018. Harga itu berlaku untuk rumah subsidi yang akad kreditnya dilakukan pada awal 2019 sampai saat ini. Harga rumah subsidi diatur pemerintah karena mendapat fasilitas subsidi dan dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai.

Khalawi menambahkan, peraturan yang akan diterbitkan hanya perihal harga rumah subsidi untuk dua tahun, yakni 2019 dan 2020. Hal itu dilakukan karena parameter atau batasan terkait harga rumah subsidi berubah. Salah satu perubahan mendasar adalah rencana pemerintah menaikkan batasan penghasilan pembeli rumah subsidi, dari yang saat ini Rp 4 juta menjadi Rp 8 juta.

"Jadi kita melihat ke arah sana. Untuk lima tahunan, pada 2020 harga rumah subsidi akan disusun lagi," katanya.

Khalawi berharap pengembang tetap membangun rumah subsidi meski aturan mengenai harga rumah subsidi belum terbit. Ditengarai, sudah ada pengembang yang menahan pasokan rumah subsidi atau menahan diri untuk membangun rumah subsidi. Langkah ini dikhawatirkan berdampak pada Program Sejuta Rumah yang tahun ini ditargetkan mencapai 1,2 juta unit.

Berdasarkan data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), sampai dengan 19 April, PPDPP telah menyalurkan subsidi berskema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk 34.516 unit rumah dengan anggaran Rp 3,31 triliun. Hingga akhir tahun ini, subsidi rumah berskema FLPP direncanakan membiayai 67.000 unit rumah.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali menyampaikan, aturan mengenai harga rumah subsidi yang belum terbit itu berdampak besar bagi arus keuangan pengembang. Akibatnya, ada pengembang yang menahan untuk tidak membangun rumah subsidi, ada yang mengurangi, serta ada pula yang melambat atau menunda pembangunan rumah.

"Tergantung arus keuangan setiap pengembang. Setiap kali ada pertemuan dengan pemerintah, selalu kami tanya, kapan aturan ini terbit," kata Daniel.

Tahun lalu, anggota Apersi membangun 120.000 unit rumah subsidi. (NAD)

Judul	**Belt & Road dan Masa Depan Tiongkok - Indonesia**	Tanggal	Sabtu, 27 April 2019
Media	Media Indonesia (Halaman, 8)		
Resume	Mewakili Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat ini sedang memimpin delegasi tingkat tinggi Indonesia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-2 Belt and Road Forum (B&R) yang digelar di Beijing Tiongkok. KTT B&R ini dihadiri ribuan delegasi dan setidaknya 150 negara dan 90 organisasi internasional. KTT ini bertujuan membahas masterplan pembangunan dalam kerangka Inisiatif B&R (Inisiatif Sabuk dan Jalan) demi menciptakan cetak biru kerja sama yang ideal dan menguntungkan bagi semua pihak.		

Belt & Road dan Masa Depan Tiongkok-Indonesia

Sun Weide
Kuasa Usaha Ad-Interim
Kedutaan Besar Republik Rakyat
Tiongkok di Indonesia

MEWAKILI Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat ini sedang memimpin delegasi tingkat tinggi Indonesia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-2 Belt and Road Forum (B&R) yang digelar di Beijing, Tiongkok.

KTT B&R ini dihadiri ribuan delegasi dari setidaknya 150 negara dan 90 organisasi internasional. KTT ini bertujuan membahas *masterplan* pembangunan dalam kerangka Inisiatif B&R (Inisiatif Sabuk dan Jalan) demi menciptakan cetak biru kerja sama yang ideal dan menguntungkan bagi semua pihak.

KTT B&R merupakan platform kerja sama internasional tertinggi dalam kerangka Inisiatif B&R. KTT Ke-2 B&R tahun ini mengusung tema *Bersama membangun B&R demi menciptakan masa depan yang cerah*. Fokus KTT ialah memajukan kerja sama internasional dalam kerangka B&R demi mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas tinggi. Pertemuan yang mendapat perhatian luas dari kalangan masyarakat internasional ini dihadiri hampir 40 pimpinan negara, lebih dari 360 pejabat tingkat menteri, dan 100 lebih petinggi organisasi internasional, dan lebih dari 4.100 jurnalis media dari Tiongkok maupun mancanegara. Para delegasi dalam pertemuan ini mencakup sejumlah besar wilayah di lima benua serta mewakili kalangan pemerintahan, LSM, dunia usaha, institusi akademik, dan lain-lain.

Inisiatif B&R memang pertama kali digagas oleh Tiongkok, tetapi peluang dan hasilnya bisa dinikmati seluruh dunia. Sejak dicetuskan, hampir enam tahun silam, inisiatif ini telah membuahkan hasil yang kaya dan memuaskan. Inisiatif ini telah menjadi kerangka kerja sama internasional yang sangat luas partisipasinya di dunia serta telah menjadi barang publik yang mendapat sambutan hangat di berbagai penjuru dunia. Saat ini, jaringan Inisiatif B&R telah mencakup 126 negara dan 29 organisasi internasional. Konsep dan inisiatif kerja sama yang berhubungan dengan B&R juga telah tertuang dalam berbagai dokumen dari mekanisme kerja sama internasional utama, seperti PBB, G-20, APEC, dan Organisasi Kerja Sama Shanghai.

Kesejahteraan rakyat

Volume perdagangan antara Tiongkok dengan negara-negara yang tergabung dalam Inisiatif B&R telah melebihi US$6 triliun, dengan nilai investasi melebihi US$80 miliar. Tiongkok telah bekerja sama dengan berbagai negara dalam kerangka ini untuk membangun 82 zona kerja sama, yang menciptakan hampir 300 ribu kesempatan kerja di negara-negara terkait. Pembangunan ini tentu mendatangkan peluang pertumbuhan signifikan dan berperan memajukan kesejahteraan rakyat di negara-negara tersebut. Sekjen PBB telah berulang kali menyatakan bahwa Inisiatif B&R memiliki arti penting dalam mewujudkan target PBB di bidang pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh dunia.

Menurut riset terbaru, yang dirilis Bank Dunia dan sejumlah organisasi internasional lainnya, kerja sama B&R akan menurunkan waktu tempuh pengangkutan barang di dunia sebesar 1,2%-2,5%, sehingga akan menurunkan biaya dalam perdagangan dunia sebesar 1,1%-2,2% dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi global setidaknya sebesar 0,1%.

Indonesia memiliki posisi penting dalam Inisiatif B&R ini. Di Indonesia-lah Tiongkok pertama kali mencetuskan gagasan Jalan Sutra Maritim Abad ke-21, yang merupakan salah satu bagian utama dari Inisiatif B&R. Bertolak dari kepentingan kesejahteraan rakyat di kedua negara, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Indonesia Joko Widodo telah mencapai kesepahaman untuk mewujudkan sinergi antara Inisiatif B&R dengan strategi pembangunan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, kesepakatan ini telah memandu hubungan antara Tiongkok dan Indonesia memasuki jalur cepat kerja sama yang saling terkait dan saling menguntungkan.

Proyek Kereta Cepat Jakarta—Bandung merupakan proyek monumental pertama dalam upaya sinergi strategi pembangunan Tiongkok dan Indonesia. Proyek yang akan menjadi jalur kereta cepat pertama di seluruh Asia Tenggara ini telah memasuki tahap implementasi menyeluruh. Kereta cepat itu nantinya akan memangkas waktu tempuh dari Jakarta ke Bandung yang semula 3 jam menjadi hanya 40 menit. Proyek kereta cepat ini juga diharapkan akan mengairahkan perekonomian di daerah-daerah yang dilewati jalur kereta.

Pada Mei 2018, pemerintah Tiongkok dan Indonesia juga telah menyepakati kerangka kerja sama Koridor Ekonomi Komprehensif Regional yang digagas Presiden Joko Widodo. Pada Maret 2019, rapat pertama Komite Pengarah Bersama untuk Pembangunan Koridor Ekonomi Komprehensif Regional Kerja Sama Pemerintah RI dan Tiongkok telah sukses digelar di Bali. Dalam rapat itu, kedua negara telah mencapai sejumlah kesepakatan positif dalam hal pembangunan kerja sama kapasitas dalam kerangka B&R, perencanaan kerja sama koridor ekonomi, kerja sama di bidang pelabuhan utama dan taman industri, dan lain-lain. Kerja sama ini meliputi empat provinsi Indonesia, yaitu Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali. Pembangunan Koridor Ekonomi ini diharapkan akan semakin menggairahkan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia.

Dengan adanya komitmen untuk mewujudkan sinergi strategi pembangunan antara Tiongkok dan Indonesia, maka kerja sama kedua negara di berbagai bidang juga terus mengalami peningkatan. Peningkatan kerja sama ini tampak nyata di sektor pembangunan infrastruktur. Tiongkok dan Indonesia telah menggalang kerja sama untuk menyelesaikan proyek-proyek besar, seperti pembangunan Jembatan Tayan di Kalimantan Barat yang menjadi jembatan lengkung baja terbesar di Indonesia, pembangunan kereta Lintas Rel Terpadu (LRT) Palembang yang merupakan LRT pertama di Indonesia, serta pembangunan Waduk Jatigede yang merupakan bendungan terbesar kedua. Penyelesaian berbagai megaproyek ini membawa manfaat besar bagi penduduk setempat, serta memberi peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di bidang lain, Tiongkok juga terus memperluas pintu impor bagi produk-produk khas Indonesia. Volume perdagangan antara kedua negara tahun lalu telah mencetak rekor tertinggi sebesar US$77,4 miliar. Neraca perdagangan kedua negara juga terus berkembang ke arah yang lebih seimbang.

Selain itu, Tiongkok juga mempertahankan posisi sebagai negara investor asing terbesar ketiga bagi Indonesia. Kedua negara telah memperbarui perjanjian swap bilateral dalam mata uang lokal, serta telah menambah nilainya hingga menjadi 200 miliar yuan (atau sekitar US$30 miliar). Kedua negara juga telah mencapai kesepahaman terkait peningkatan impor Tiongkok untuk minyak sawit Indonesia, serta dalam hal kerja sama pendanaan proyek penanaman kembali (*replanting*) pohon sawit. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok juga merupakan negara sumber wisatawan asing terbesar bagi Indonesia, sekaligus sebagai destinasi studi keluar negeri terbesar kedua bagi pelajar Indonesia.

Pembangunan bersama Inisiatif B&R dan Poros Maritim Dunia telah terbukti selaras dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan kedua negara. Penyinergian strategi pembangunan kedua negara ini juga akan mendorong kemajuan hubungan kemitraan strategis komprehensif antara Tiongkok dan Indonesia. Kerja sama yang erat ini tentunya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara beserta segenap rakyatnya. Saya percaya, keberhasilan penyelenggaraan KTT B&R kali ini akan mendatangkan masa depan yang cerah bagi kedua negara dan bagi peningkatan hubungan bilateral antara Tiongkok dan Indonesia.

Judul	**23 Proyek OBOR Diteken**	Tanggal	Sabtu, 27 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 4)		
Resume	Para pebisnis Indonesia dan China akhirnya meneken 23 kesepakatan kerja sama di berbagai sektor usaha. Ini menandai dimulainya proyek One Belt One Road (OBOR) di Tanah Air.		

23 Proyek OBOR Diteken

Bisnis, BEIJING — Para pebisnis Indonesia dan China akhirnya meneken 23 kesepakatan kerja sama di berbagai sektor usaha. Ini menandai dimulainya proyek One Belt One Road (OBOR) di Tanah Air.

Feni Freycinetia Fitriani
feni.freycinetia@bisnis.co.id

Penandatanganan kesepakatan kerja sama itu disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam acara Forum Bisnis Indonesia-China, Jumat (26/4).

Momen itu juga bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kedua One Belt One Road yang resmi dibuka oleh Presiden Cina Xi Jinping Jumat pagi waktu setempat.

Proyek OBOR atau yang juga dikenal *Belt and Road Initiative* merupakan kebijakan luar negeri yang diinisiasi oleh China untuk membuka keran konektivitas dagang antarnegara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, sejumlah negara telah menyepakati proyek OBOR tersebut dengan China, tetapi ada yang kemudian menangguhkannya bahkan menghentikannya.

Pasalnya, proyek yang digadang-gadang sebagai 'proyek abad ini' tersebut menuai banyak kritikan karena menimbulkan pembengkakan utang dan ketergantungan negara-negara lain terhadap China.

Dengan Indonesia, proyek OBOR kini berhasil membuahkan kesepakatan kerja sama. Adapun, kerja sama itu difokuskan pada empat koridor, yakni Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sumatra Utara, dan Bali.

Di depan pebisnis dari kedua negara, Kalla menegaskan hubungan bisnis antara Indonesia dan China ke depannya lebih banyak berbentuk *business to business* (B-to-B) daripada *government to government* (G-to-G).

"Saya menyaksikan penandatanganan sejumlah MoU. Itu bukan hanya untuk seremonial di sini, tetapi harus dilaksanakan secara baik dan konsisten dalam bentuk B-to-B," ujar Wakil Presiden.

JK juga memastikan Indonesia akan menghindari seakan-akan China yang menentukan pembangunan infrastruktur. Justru, Indonesia yang memegang kendali pada pengelolaan proyek-proyek tersebut.

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan berjanji akan mempermudah proses perizinan bagi pengusaha China yang ingin ambil bagian dalam proyek OBOR di Indonesia.

Saat ini, proyek yang berada dalam payung Koridor Indonesia memang lebih siap untuk digarap investor karena sudah melalui uji kelayakan (*feasibility study*). Salah satu pusat industri terintegrasi paling siap dan menjadi percontohan ada di Morowali, Sulawesi Tengah.

Selain memiliki teknologi pengolahan dari komoditas murni menjadi produk bernilai tambah, pemerintah juga telah membangun Politeknik Metalurgi di sana sehingga warga bisa belajar pengetahuan teknis agar bisa bekerja di pabrik menggantikan tenaga kerja asing.

"Politeknik ini dibantu sama Pak M. Nasir [Menristek Dikti]. Ini artinya ada transfer pengetahuan dan teknologi," imbuhnya.

Meski demikian, dia mempersilakan jika ada investor yang berniat masuk di proyek-proyek nonkoridor.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyambut baik penandatanganan kesepakatan di antara pebisnis kedua negara. Dia mengatakan hubungan bisnis Indonesia dan China secara B-to-B cenderung lebih baik ketimbang secara G-to-G.

Secara fiskal, hubungan tersebut juga lebih aman lantaran utang bukanlah tanggungan pemerintah Indonesia melainkan swasta.

Kendati demikian, meski ke depan hubungan Indonesia dan China cenderung bersifat B-to-B, dia meminta pemerintah mengatur secara jelas perihal tenaga kerja, transfer teknologi, hingga dari segi pekerjaannya.

JANJI JINPING

Sementara itu, dalam pidato pembukaan KTT, Presiden China Xi Jinping menegaskan *Belt and Road Initiative* harus dilakukan dengan konsep ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kerja sama antara China dan negara anggota *Belt and Road Initiative*, katanya, terbukti mampu meningkatkan perekonomian global, membangun platform baru, dan menawarkan cara anyar guna membangun perekonomian masyarakat di berbagai negara.

"Saat ini, total ada 130 negara yang tergabung dalam program BRI, dari benua Eurasia hingga Afrika, Amerika, dan Oseania," katanya.

Xi Jinping juga mengumumkan beberapa perubahan dalam kebijakan pasar di Cina. Dia berjanji akan membuka kesempatan lebih besar kepada perusahaan asing untuk berinvestasi di berbagai sektor, menjaga hak properti intelektual, dan meningkatkan impor barang dan jasa dari negara lain.

JK menambahkan China sudah menyetujui untuk meningkatkan impor minyak sawit sekaligus membuka pintu masuk impor buah-buahan tropis asal Indonesia.

Sekjen Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia Togar Sitanggang menyambut baik komitmen China untuk meningkatkan impor minyak sawit sekaligus membuka pintu masuknya impor buah-buahan tropis asal Indonesia. *(Dewi A. Zuhriyah)*

Kerja Sama yang Disepakati di Forum Bisnis Indonesia-China

Perusahaan Indonesia	Perusahaan China	Kerja sama	Nilai
Borneo Alumindo Prima	Ketapang Bangun sarana	Smelter di Kawasan Industri Ketapang	
Adhidaya Suprakencana	China Gezhouba Group	Kawasan Industri Mangkupadi Tanah Kuning	
Indonesia Dafeng Heshun	China Gezhouba Group	PLTA Kayan	US$1,5 miliar
Indonesia China Business Council	Zhongde Environmental Protection Co	Investasi pengolahan limbah	US$3 miliar
Lentera Damar Amerta	China Gezhouba Group	PLTA Salo Pebatua	US$560 juta
Sentul City	Guiyang Hongyi Real Estate	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus seluas 31.000 Ha	US$9 miliar
Toba Bara Sejahtera	Powerchina International Group	Elektrifikasi Sulbagut-1 dan Sulut-3	
Pelindo II	Ning Bo Zhoushan	Kerja sama *sister port*	
Wahana Lestari Investama	Fuzhou Hong Long Ocean Fishing	Industri perikanan terintegrasi di Pulau Seram, Maluku	US$150 juta
Pelindo I	Ning Bo Zhousan	Kerja sama pengembangan Kuala Tanjung dan kawasan industri	
ITB	Tsinghua University	Pengembangan program pendidikan	
PT Smartfren Telecom Tbk.	ZTE	Penjajakan kerja sama dan uji coba 5G	
PT Kura Bali	China State Construction, ATM Capital, GTech Digital Asia, Autodesk, Castle & Living Pop-Up, TUS Holdings, Tusstar, Baozun, Forchn Holdings, Shenzhen Fountain	Tech Park dan Creative Campus	
Indonesia Lumbung Group Co	Engineering Department of China National Electric	Pembangkit listrik batu bara 2x300MW	

BISNIS/YAYAN INDRAYANA

Antara/M. Irfan Ilmie

Rektor ITB Kadarsah Suryadi (*kedua kiri*) berjabat tangan dengan Wakil Rektor Tsinghua University Yang Bin (*kedua kanan*) seusai penandatanganan nota kerja sama bidang pendidikan dan penelitian didampingi Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan (*kanan*) dan Menristekdikti M. Nasir di Beijing, China, Jumat (26/4).

Judul	**Kementerian PUPR Evaluasi Konstruksi Gedung di Jakarta**	Tanggal	Sabtu, 27 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	Kementerian PUPR membentuk komite keselamatan konstruksi untuk mengevaluasi gedung-gedun di Jakarta, yang selanjutnya juga akan menjadi percontohan bagi kota-kota lain. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk pertama kalinya Kementerian PUPR membentuk komite keselamatan konstruksi untuk gedung-gedung di Ibu Kota yang telah melakukan pengamatan sejak Februari 2019-April 2019.		

▸ KESIAPAN BENCANA

Kementerian PUPR Evaluasi Konstruksi Gedung di Jakarta

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membentuk Komite Keselamatan Konstruksi untuk mengevaluasi gedung-gedung di Jakarta, yang selanjutnya juga akan menjadi percontohan bagi kota-kota lain.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk pertama kalinya Kementerian PUPR membentuk komite keselamatan konstruksi untuk gedung-gedung di Ibu Kota yang telah melakukan pengamatan (*monitoring*) sejak Februari 2019—April 2019.

"Dirjen Bina Konstruksi bertanggung jawab terhadap komite keselamatan konstruksi, itu saya *tugasin* beliau untuk mengevaluasi dan memonitor kondisi gedung-gedung di Jakarta terutama terhadap bahaya kebakaran," ujarnya di Jakarta, Jumat (26/4).

Menurut Basuki, pembentukan komite ini dilatarbelakangi oleh data gempa dari BNPB bahwa ada beberapa sesar yang melewati Jakarta sehingga gedung-gedung harus melakukan tindakan preventif sebelum terjadi bencana. Selain itu, untuk gedung-gedung tinggi apabila terjadi gempa rentan oleh kebakaran.

Sampel pertama yang telah dievaluasi adalah untuk gedung Grand Indonesia, Blok M Plaza, Apartemen Rajawali, Gedung Bina Marga Kementerian PUPR, dan Gedung Cipta Karya Kementerian PUPR. Penilaian yang dilakukan menggunakan poin dengan skala 10—100 dengan nilai minimum 50 poin.

"Hasil dari evaluasi pertama kalau Grand Indonesia 87 poin, Gedung Cipta Karya dan Bina Marga 59 poin, tetapi artinya masih patuh terhadap antisipasi kecelakaan," tuturnya.

Basuki menambahkan, apabila nantinya terdapat gedung yang hasil evaluasinya kurang dari 50 poin, akan dilakukan intervensi dalam hasil rekomendasi yang dikeluarkan. Meskipun belum ada sanksi, pihak Kementerian PUPR terus melakukan *monitoring* dan akan memberikan tenggat waktu kepada pemilik gedung.

Indikator penilaian ada 3 aspek yakni kepatuhan komitmen, kepatuhan terhadap legalitas dan aspek dalam rangka kebencanaan yakni keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

Selanjutnya, selama April dilakukan evaluasi terhadap rumah susun Jatinegara, Gedung Bidakara, dan Gedung Kementerian Keuangan.

Evaluasi dari Komite Keselamatan Konstruksi ini juga menjadi percontohan bagi daerah-daerah lainnya yang kedepannya akan dilakukan hal serupa.

"Tahun ini akan dilakukan di kota-kota lain, mungkin di kota-kota besar seperti Makassar, Medan, dan Surabaya." ***(Krizia Putri Kinanti)***

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life Lantai 12
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Tel.: (021) 5289 0000 (hunting), Fax.: (021) 5289 0019
Website: www.sunlife.co.id

Sun Life

Laporan Keuangan

Per 31 Desember 2018 dan 2017

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam jutaan Rupiah)

ASET	2018	2017	LIABILITAS DAN EKUITAS	2018	2017
I. INVESTASI			**I. UTANG**		
1 Deposito Berjangka	1,695,253	1,311,859	1 Utang Klaim	122,466	152,618
2 Sertifikat Deposito	-	-	2 Utang Koasuransi	-	-
3 Saham	4,335,794	2,704,116	3 Utang Reasuransi	139,840	70,838
4 Obligasi Korporasi	270,798	211,595	4 Utang Komisi	41,572	34,153
5 MTN	-	-	5 Utang Pajak	54,220	85,182
6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	4,178,558	4,430,504	6 Biaya yang Masih Harus Dibayar	225,480	187,644
7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	-	7 Utang Lain	260,784	213,673
8 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	**8 Jumlah Utang (1 s/d 7)**	**844,364**	**749,108**
9 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-			
10 Reksa Dana	410,119	2,109,549	**II. CADANGAN TEKNIS**		
11 Efek Beragun Aset	-	-			
12 Dana Investasi Real Estat	-	-	9 Cadangan Premi	9,564,234	9,358,718
13 REPO	-	-	10 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	39,294	33,852
14 Penyertaan Langsung	-	-	11 Cadangan Klaim	66,151	51,024
15 Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi	-	-	12 Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)	116	126
16 Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)	-	-	**13 Jumlah Cadangan Teknis (9 s/d 12)**	**9,669,795**	**9,443,720**
17 Emas Murni	-	-			
18 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	-			
19 Pinjaman Polis	177,809	171,900			
20 Obligasi Daerah	-	-			
21 Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-			
22 Investasi Lain	-	-			
23 Jumlah Investasi (1 s/d 22)	**11,073,331**	**10,939,523**	**14 Jumlah Liabilitas (8 + 13)**	**10,500,179**	**10,191,828**
			15 Pinjaman Subordinasi	-	-
II. BUKAN INVESTASI					
24 Kas dan Bank	141,319	111,576	**III. EKUITAS**		
25 Tagihan Premi Penutupan Langsung	20,096	16,115	16 Modal Disetor	1,420,129	1,420,029
26 Tagihan Premi Reasuransi	-	-	17 Tambahan Modal Disetor	(215,299)	(215,299)
27 Aset Reasuransi	67,198	74,640	18 Saldo Laba	50,104	(126,873)
28 Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	19 Komponen Ekuitas Lainnya	240,910	473,121
29 Tagihan Klaim Reasuransi	68,304	29,091			
30 Tagihan Investasi	83,762	74,894			
31 Tagihan Hasil Investasi	99,764	94,036			
32 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	-	-			
33 Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	22,333	12,917			
34 Aset Tetap Lain	59,635	49,765			

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	2018	2017
1 **PENDAPATAN**		
2 Pendapatan Premi	2,887,021	2,857,984
3 Premi Reasuransi	(149,994)	(134,176)
4 Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP [1]	(795)	23,680
5 Jumlah Pendapatan Premi Neto	**2,736,232**	**2,747,488**
6 Hasil Investasi	215,628	1,119,632
7 Imbalan Jasa OPLK/Jasa Manajemen Lainnya	-	-
8 Pendapatan Lain	108,401	96,589
9 Jumlah Pendapatan	**3,060,261**	**3,961,709**
10 **BEBAN**		
11 **Beban Asuransi**		
12 **Klaim dan Manfaat**		
a. Klaim dan Manfaat Dibayar	412,111	370,309
b. Klaim Penebusan Unit	952,066	1,003,921
c. Klaim Reasuransi	(60,999)	(42,631)
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	200,892	1,734,799
e. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	17,840	11,329
f. Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)	(10)	126
13 Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	**1,521,900**	**3,077,843**
14 **Biaya Akuisisi**		
a. Beban Komisi - Tahun Pertama	243,873	190,325
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan	72,020	86,000
c. Beban Komisi - Overriding	126,916	103,747
d. Beban Lainnya	192,658	158,327
15 Jumlah Biaya Akuisisi	**635,667**	**538,399**
16 Jumlah Beban Asuransi	**2,157,567**	**3,616,242**
17 Beban Usaha		
a. Beban Pemasaran	135,239	118,153
b. Beban Umum & Administrasi		
- Beban Pegawai dan Pengurus	265,384	241,211
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	14,749	12,073
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	234,828	261,332
c. Beban Manajemen	-	-
d. Beban Monitasi	-	-
e. Beban Usaha Lainnya	74,174	64,160
18 Jumlah Beban Usaha	**724,374**	**696,929**

INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	2018	2017
PEMENUHAN TINGKAT SOLVABILITAS		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Aset Yang Diperkenankan	4,856,867	5,123,287
b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	3,879,755	3,788,182
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas	977,112	1,355,105
B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) [2]		
a. Risiko Kredit	11,982	12,573
b. Risiko Likuiditas	11,339	9,017
c. Risiko Pasar	73,130	58,322
d. Risiko Asuransi	92,080	108,402
e. Risiko Operasional	10,450	10,352
f. Jumlah MMBR	196,981	198,666
C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas	**778,131**	**1,156,438**
D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (%) [3]	**491%**	**682%**
RASIO SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS		
a. Rasio Kecukupan Investasi (%)	147%	144%
b. Rasio Likuiditas (%)	127%	157%
c. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto (%)	8%	41%
d. Rasio Beban (Klaim, Usaha dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%)	54%	74%

Keterangan :
1. CAPYBMP = Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan.
2. MMBR = Modal Minimum Berbasis Risiko adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Rasio pencapaian Tingkat Solvabilitas seluruhnya-kurangnya adalah 100% dengan target internal paling rendah 120% dari MMBR.
4. Laporan Keuangan ini telah mendapatkan pengesahan dari Direksi dan Dewan Komisaris pada rapat yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 April 2019 serta Pemegang Saham melalui keputusan sirkular Pemegang Saham pada tanggal 25 April 2019.
5. PT Sun Life Financial Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Judul	**Berita Foto**	Tanggal	Minggu, 28 April 2019
Media	Kompas (Halaman, 8)		
Resume	Bendungan Batujai, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, saat [enuh dengan stovk cadangan air baku, Sabtu (27/4/2019), Selain difungsikan sebagai penampung cadangan air, bendungan tersebut juga akan dikembangkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai tempat wisata dengan konsep danau untuk menarik wisatawan.		

Bendungan Batujai

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Bendungan Batujai, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, saat penuh dengan stok cadangan air baku, Sabtu (27/4/2019). Selain difungsikan sebagai penampung cadangan air, bendungan tersebut juga akan dikembangkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai tempat wisata dengan konsep danau untuk menarik wisatawan.

Judul	**Anies Andalkan Waduk Atasu Banjir**	Tanggal	Minggu, 28 April 2019
Media	Media Indonesia (Halaman, 4)		
Resume	Waduk memang dapat menuntaskan problem banjir di Jakarta, tetapi membebaskan sungai dari penyempitan dan tumpukan sampah tidak kalah pentingnya. Bukannya segera memberesi sungai-sungai yang kian sempit dan dipadati sampah sehingga menimbulkan banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malah mengandalkan dua waduk di Bogor untuk menyelamatkan Jakarta dan wilayah sekitarna dari banjir.		

Anies Andalkan Waduk Atasi Banjir

Waduk memang dapat menuntaskan problem banjir di Jakarta, tetapi membebaskan sungai dari penyempitan dan tumpukan sampah tidak kalah pentingnya.

Putri Anisa Yuliani
putrianisa@mediaindonesia.com

BUKANNYA segera memberesi sungai-sungai yang kian sempit dan dipadati sampah sehingga menimbulkan banjir.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malah mengandalkan dua waduk di Bogor untuk menyelamatkan Jakarta dan wilayah sekitarnya dari banjir.

"Jadi, solusinya harus pengendalian air dari hulu. Selama volume air dari hulu tidak dikendalikan, dua tahun lagi tahu-tahu tempat mana (banjir). Tiga tahun lagi tempat mana. Ini semua karena air dari hulu ke pesisir tidak dikendalikan," kata Anies seusai meresmikan Taman O di Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur, kemarin.

Menurutnya, hal itu terlihat dari beberapa wilayah yang minim dari guyuran hujan, tetapi mengalami banjir hingga ketinggian semeter. Pendek kata, saat ini pengendalian volume air di hulu menjadi prioritas dalam mengendalikan banjir di Ibu Kota.

"Bagaimana membangun bendungan untuk kemudian airnya dialihkan secara bertahap. Kemudian volume air yang turun ke pesisir bisa dikontrol," lanjut Anies.

Dua waduk kini sedang dalam tahap penyelesaian, yakni Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. Kedua waduk ini ditargetkan mampu mengurangi air yang mengalir ke hilir hingga 30% dan selesai Desember 2019.

Selain kedua bendungan yang menelan dana APBN Rp2 triliun itu, Kementerian PU-Pera juga tengah menggarap proyek sodetan Kali Ciliwung untuk mengurangi debit air yang mengalir di Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur. Namun, sayangnya proyek di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane itu masih terhambat proses pembebasan lahan.

Banjir di sebagian wilayah Jakarta sejak Jumat (26/4) dan kemarin lebih disebabkan oleh air dari wilayah hulu, yakni Bogor. Tidak hanya Jakarta, hampir semua daerah hilir terkena dampak air kiriman dari Bogor, seperti Tangerang Selatan, Bekasi, dan Depok.

"Jadi, saat ini menerima limpahan air dari hulu yang volumenya besar. Di Jakarta kita bersyukur bahwa permukaan air laut pukul 08.00 WIB turun," ujar Anies.

Apabila permukaan air laut ikut mengalami pasang, itu akan menyebabkan air di sungai tidak bisa mengalir ke laut karena terjebak di wilayah tengah sehingga banjir yang menimpa permukiman warga lama surutnya.

Berangsur surut

Hingga kemarin, banjir masih menggenangi 198 RT yang tersebar di 448 RW di wilayah DKI. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI terdapat 1.097 kepala keluarga dan 2.519 orang terdampak banjir. Jumlah pengungsi hingga kemarin tercatat 376 kepala keluarga atau 2.566 jiwa.

Banjir setinggi 2,5 meter yang merendam RW 07 Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, sejak Jumat (26/4) berangsur-angsur mulai surut. Kemarin pukul 15.30 WIB warga tampak sudah mulai membersihkan rumah dan barang-barang yang terendam. Tidak sedikit dari mereka mulai memasukkan barang ke dalam rumah.

Salah seorang warga, yang terlihat penuh lumpur di sepatu bot karet yang dikenakannya, mengatakan banjir sudah mulai surut sejak kemarin pagi.

"Sekarang warga lagi bersih-bersih, banyak lumpur dan sampah di dalam rumah," ungkap Budiarto saat ditemui di kediamannya di Rawajati, Jakarta, kemarin.

Sejumlah warga lain juga terlihat sedang membersihkan peralatan rumah tangga dengan perlengkapan seadanya, termasuk sepeda motor yang terendam. (Rif/X-3)

Judul	**Berita Foto**	Tanggal	Senin, 29 April 2019
Media	Media Indonesia (Halaman Utama)		
Resume	Terendam Banjir: Foto dari udara kendaraan melintasi kawasan yang terndam banjir di kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bengkulu, Sabtu (27/4).		

AFP/DIVA MARHA

TERENDAM BANJIR: Foto dari udara kendaraan melintasi kawasan yang terendam banjir di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Bengkulu, Sabtu (27/4). Berdasarkan data dari BNPB, banjir dan tanah longsor yang terjadi di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu mengakibatkan 17 orang meninggal dunia, 9 orang hilang, dan sekitar 12 ribu orang mengungsi.

Judul	**Berita Foto**	Tanggal	Senin, 29 April 2019
Media	Kompas (Halaman Utama)		
Resume	Banjir meredam sejumlah wilayah di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Minggu (28/4/2019). Menurut pemerintah provinsi Bengkulu, setidaknya 17 orang meninggal dan 9 warga hilang akibat banjir dan longsor. Kerugian akibat kerusakan infrastruktur diperkirakan mencapai Rp 138 miliar.		

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Banjir merendam sejumlah wilayah di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Minggu (28/4/2019). Menurut Pemerintah Provinsi Bengkulu, setidaknya 17 orang meninggal dan 9 warga hilang akibat banjir dan longsor. Kerugian akibat kerusakan infrastruktur diperkirakan mencapai Rp 138 miliar.

Judul	**Pangan untuk Kota**	Tanggal	Senin, 29 April 2019
Media	Kompas (Halaman, 13)		
Resume	Ketika kota tumbuh makin besar, satu hal yang tak boleh dilupakan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan perut warganya. Selain tata ruang wilayah, perkembangan kota yang semakin pesat mengubah konfigurasi lingkungan, sosial, dan ekonomi, termasuk urusan pangan dan gizi penduduknya.		

PERKOTAAN

Pangan untuk Kota

Ketika kota tumbuh makin besar, satu hal yang tak boleh dilupakan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan perut warganya. Selain tata ruang wilayah, perkembangan kota yang semakin pesat mengubah konfigurasi lingkungan, sosial, dan ekonomi, termasuk urusan pangan dan gizi penduduknya.

Pangan menjadi tema yang semakin urgen karena urbanisasi telah memengaruhi kenyataan global. Kota besar menjadi pilihan tempat tinggal. Bahkan, pada 2050, sekitar 70 persen penduduk dunia diperkirakan tinggal di perkotaan. Oleh karena itu, Organisasi Pangan dan Pertanian Persatuan Bangsa-Bangsa (FAO) meluncurkan inisiatif bernama *"Food for the Cities"* pada 2001 sebagai salah satu upaya mengatasi tantangan urbanisasi bagi penduduk perkotaan dan perdesaan.

Kondisi Indonesia tidak jauh beda. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan, jumlah penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa pada tahun 2045. Ketika itu, penduduk perkotaan di Indonesia mencapai 67 persen, tumbuh lebih besar dibandingkan dengan situasi tahun 2015 yang mencapai 53 persen.

Selain antara kota dan desa, persebaran penduduk di Indonesia mengalami ketidakseimbangan antara Jawa dan luar Jawa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penduduk di Jawa pada tahun 2017 mencapai 56,57 persen meski luasnya hanya 6,74 persen dari total 1,91 juta kilometer persegi wilayah Indonesia. Karena itu, penyediaan pangan kota di masa depan, tak kalah penting dibandingkan papan, listrik dan air, ataupun transportasi.

Perebutan sumber-sumber pangan akan semakin pelik. Sebab, ketika kebutuhan pangan terus bertambah, lahan pertanian semakin susut luas dan kualitasnya. Data terbaru yang dipublikasi pemerintah Oktober 2018 menyebutkan, luas baku sawah berkurang dari 7,75 hektar jadi 7,1 juta hektar selama 2013-2018. Artinya, alih fungsi 130.000 hektar per tahun, setara dengan dua kali wilayah ibu kota Jakarta.

SUPRIYANTO

Alih fungsi masif terjadi di Jawa yang diberkahi tanah subur. Selain permukiman, lahan diubah fungsinya untuk memenuhi kebutuhan industri, membangun infrastruktur, dan kebutuhan nonpertanian lainnya. Ironisnya, selain jadi tempat mukim mayoritas penduduk, Jawa hingga kini masih jadi tumpuan produksi sejumlah bahan makanan utama, seperti beras, jagung, gula, daging dan telur ayam, serta daging dan susu sapi.

Dengan demikian, penyediaan pangan menghadapi tantangan yang rumit di masa depan, termasuk bagi warga kota. Kebutuhan pangan kota secara tradisional memang telah terbentuk. Wilayah Jabodetabek, misalnya, disuplai dari beberapa kabupaten di Jawa Barat dan Banten, sebagian dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan luar Jawa. Namun, kontinuitasnya jadi persoalan, tecermin dari harga yang masih fluktuatif. Kualitasnya juga belum stabil. Apalagi produk pangan umumnya cepat rusak.

Tahun 2017, Kementerian Pertanian mengenalkan pengembangan wilayah penyangga untuk Jakarta, seperti konsep *city region food systems* (CRFS) FAO yang mencakup produksi, pengolahan, dan konsumsi. Konsep ini memungkinkan solusi konkret yang menguatkan kota dan desa, produsen sekaligus konsumen. Realitasnya memang masih jauh dari ideal. Namun, ketahanan dan kedaulatan pangan mesti diperjuangkan. (MUKHAMAD KURNIAWAN)

Judul	**Investasi ke Luar Negeri Perkuat Kemitraan**	Tanggal	Senin, 29 April 2019
Media	Kompas (Halaman, 14)		
Resume	Indonesia dinilai perlu memiliki kebijakan terkait investasi ke luar negeri. Selain bermanfaat bagi kepentingan nasional, investasi di luar negeri juga berpotensi meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara mitra.		

PERDAGANGAN

Investasi ke Luar Negeri Perkuat Kemitraan

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia dinilai perlu memiliki kebijakan terkait investasi ke luar negeri. Selain bermanfaat bagi kepentingan nasional, investasi di luar negeri juga berpotensi meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara mitra.

"Kebijakan terkait investasi di luar negeri harus segera diwujudkan," kata Direktur Eksekutif Indonesian Agency for Outbond Investment Development Guspiabri Sumowigeno ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu (28/4/2019).

Menurut Guspiabri, negara lain kini gencar membidik potensi investasi di luar negeri. China dan Malaysia, misalnya, terus menyurvei detail potensi untuk meningkatkan keuntungan bagi negaranya.

Investasi satu negara ke negara lain berarti ada kepercayaan di antara kedua negara. "Peningkatan volume perdagangan pun dapat ditempuh melalui investasi," kata Guspiabri.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sudah menegosiasikan perjanjian tarif preferensial (PTA) dan perjanjian kemitraan ekonomi menyeluruh (CEPA). Langkah itu diharapkan dapat membuka pasar baru bagi produk ekspor asal Indonesia.

Salah satu peluang besar bagi Indonesia adalah Australia. Menurut Airlangga, pasar Australia adalah pasar yang terbuka. Negosiasi CEPA yang sudah ditandatangani masih menunggu ratifikasi parlemen kedua negara.

Pemerintah berencana mempercepat belanja modal untuk menunjang investasi dan ekspor tahun 2020. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi 5,6 persen diharapkan tercapai.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyatakan, agar anggaran lebih cepat terserap, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur sebagian besar akan dialihkan ke Kementerian PUPR yang selama ini penyerapannya lebih dari 90 persen.

Menurut Basuki, total anggaran belanja modal dan barang tahun 2020 sekitar Rp 800 triliun. Demi mendorong investasi dan ekspor, belanja modal akan diperbesar, sementara belanja barang dikurangi atau setidaknya sama dengan tahun 2015, yakni Rp 647,3 triliun.

(CAS/NAD)

Judul	**Kali Malang, Penanda Perubahan Peradaban**	Tanggal	Senin, 29 April 2019
Media	Kompas (Halaman, 24)		
Resume	Sejak diresmikan Pejabat Presiden Soeharto pada 26 Agustus 1967, Kali Malang menjadi saksi sejarah perubahan peradaban di Kora Bekasi, Jawa Barat. Kini, kali sepanjang 71 kilometer itu tengah menanti perubahan. Berbeda dari sungai alarm di Jawa Barat yang mengalir dari selatan ke utara atau sebaliknya, Kali Malang mengalir dari timur ke barat. Kali buatan itu mengalir memalang sejumlah sungai alam, seperti sungai cirata, sungai Bekasi, dan Sungai Cakung.		

Kali Malang, Penanda Perubahan Peradaban

Sejak diresmikan Pejabat Presiden Soeharto pada 26 Agustus 1967, Kali Malang menjadi saksi sejarah perubahan peradaban di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kini, kali sepanjang 71 kilometer itu tengah menanti perubahan.

Stefanus Ato

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

KOMPAS/KARTONO RYADI

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Dalam foto yang diambil pada 1 Juli 1974 terlihat warga beramai-ramai menangkap ikan-ikan yang mabuk di Kali Malang, Jakarta Timur (kanan). Kali Malang diapit Tol Becakayu di kawasan Bintara Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (27/4/2019) (kiri). Warga mencari ikan di saluran Kali Malang yang melintasi kawasan Marga Jaya, Kota Bekasi, Sabtu (27/4) (bawah).

Berbeda dari sungai alam di Jawa Barat yang mengalir dari selatan ke utara atau sebaliknya, Kali Malang mengalir dari timur ke barat. Kali buatan itu mengalir memalang sejumlah sungai alam, seperti Sungai Cirata, Sungai Bekasi, dan Sungai Cakung.

"Disebut Kali Malang karena dia mengalir memalangi kali alam. Posisi kali tersebut berada di atas kali alam, yang kemudian menyatu. Tetapi, prinsipnya dia ada di atas kali alam," kata pemerhati sejarah Ali Anwar, Jumat (26/4/2019), di Bekasi.

Kali Malang juga terhubung dengan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, dan membentang melintasi Karawang, Bekasi, hingga Cawang, Jakarta Timur.

Peresmian kali itu dilakukan bersamaan dengan peresmian Waduk Jatiluhur.

Kali Malang dibangun pada zaman Presiden Soekarno tahun 1957 dan ditargetkan rampung tahun 1962. Namun, karena persoalan teknis dan situasi politik di dalam negeri, penyelesaian proyek itu molor.

Meski saat itu di Bekasi telah ada Sungai Bekasi, warga antusias menyerahkan lahan secara cuma-cuma untuk pengerjaan proyek Kali Malang. Hal itu menjadi wujud karakter bangsa Indonesia, termasuk Bekasi yang dikenal berjiwa sosial dan memiliki semangat gotong royong.

Pembangunan Kali Malang merupakan kebijakan pemerintah untuk memenuhi pasokan air baku bagi warga Jakarta. Tahun 2018, pasokan air baku sebanyak 725 meter kubik bagi warga Jakarta disuplai dari aliran air di Kali Malang.

Kali itu juga berfungsi sebagai saluran irigasi, termasuk mengairi area persawahan warga Bekasi.

"Sejak ada Kali Malang, hasil panen warga meningkat. Awalnya mereka hanya panen sekali setahun, meningkat menjadi dua hingga tiga kali setahun," ucap Ali.

Awal pencemaran

Sejak berfungsi setengah abad lalu, air Kali Malang mengalir dengan sangat jernih. Saking jernihnya, air kali ini bahkan berkilau ketika terpapar sinar matahari.

Situasi itu tentu berbeda dengan saat ini.

Sore itu, Senin (22/4) di tepi Kali Malang dekat Kampus Unisma, Kota Bekasi, air mengalir perlahan. Seorang perempuan setengah baya duduk di beton salah satu sisi saluran itu. Perlahan pakaian demi pakaian dikucak, dibilas.

Tak jauh dari perempuan itu, sejumlah pria sibuk membersihkan tubuh yang berlumpur.

Di balik aktivitas sejumlah warga sore itu, aliran air Kali Malang dipenuhi sampah eceng gondok, sampah plastik, daun kering, dan bangkai tikus. Sampah yang mengapung itu bak berkejaran terseret arus air dengan debit 20.200 liter per detik.

Namun, sampah yang terbawa air itu tidak dihiraukan warga. Mereka tetap beraktivitas di sungai seperti biasa.

"Saya sudah hampir setengah tahun ini mandi dan cuci pakai air kali ini. Tak ada apa-apa, kulit saya cocok," kata Maban (60), perempuan separuh baya itu.

Perubahan air Kali Malang menandakan perubahan peradaban warga Bekasi.

Bantaran Kali Malang dulu hanya dimanfaatkan warga untuk menanam berbagai aneka sayuran, seperti kangkung, bayam, dan sawi.

Aktivitas yang terus menggeliat itu perlahan diikuti dengan tumbuhnya bedeng-bedeng. Bedeng kemudian berganti menjadi rumah semipermanen hingga menjadi permanen.

Air Kali Malang tak lagi dimanfaatkan hanya untuk membasahi tanaman, tetapi juga untuk mencuci dan membilas pakaian. Sisa detergen dibuang ke kali.

Lebih dari itu, kakus terapung pun ada di sana. Kotoran manusia menyatu dengan air Kali Malang.

Keadaan serupa itu setidaknya masih terlihat di luar Bekasi di Karawang. Berdasarkan catatan *Kompas*, Senin (4/2), warga di Desa Wadas, Teluk Jambe, Karawang, membuang hajat dan mandi di kali tersebut. Di tempat itu juga ditemukan bilik-bilik semipermanen untuk mandi, cuci, kakus.

Menurut Ali Anwar, keruhnya Kali Malang dan Kali Bekasi berawal dari beruhahnya sejumlah wilayah sekitar Jakarta, termasuk Bekasi.

Bekasi bersalin rupa menjadi kawasan industri dan perumahan. Hal itu terjadi setelah tahun 1974, pertumbuhan penduduk Jakarta kian padat.

"Bekasi yang awalnya berupa rawa dan sawah disulap jadi kawasan industri dan perumahan. Supaya tidak banjir, dibangun saluran-saluran dari perumahan dan dialirkan ke Kali Bekasi," kata Ali.

Kali Malang

INFOGRAFIK/LUKAS

Tercemar "coli" tinja

Meski masih menjadi pemasok utama air baku bagi warga Jakarta dan sebagian warga Bekasi, Kali Malang kian tercemar. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tahun 2012-2017 menunjukkan, konsentrasi *coli* tinja di Kali Malang mulai dari 5.750 jumlah sel (jml)/100 mililiter (ml) sampai 340.000 jml/100 ml. Konsentrasi tertinggi ditemukan tahun 2018, yakni 1 juta jml/100 ml.

Kompas pernah menguji sampel air Kali Malang di laboratorium PT ALS Indonesia di Sentul, Jawa Barat. Pengambilan sampel dilakukan tenaga laboratorium PT ALS di ruas aliran Kali Malang, dekat Jalan Mayor Madmuin Hasibuan, Kota Bekasi, Selasa, 22 November 2018, pukul 14.30.

Saat pengambilan sampel, cuaca di lokasi tersebut dalam kondisi hujan rintik. Beberapa jam sebelum sampel diambil, wilayah Bekasi diguyur hujan deras.

Hasil pengujian itu menunjukkan konsentrasi *coli* tinja sebesar 3.000 jml/100 ml. Hal itu jauh lebih tinggi dari standar baku mutu untuk baku air minum yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, yakni 1.000 jml/100 ml.

Rencana penataan

Di tengah isu pencemaran Kali Malang, angin segar datang dari Bandung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merencanakan penataan Kali Malang melalui unggahan di akun Instagram-nya pada 12 September 2018.

Dua pekan kemudian, dia kembali memperbarui informasi itu dengan menganggah gambar calon rancangan Kali Malang.

Model penataan Kali Malang yang didesain Ridwan Kamil mengingatkan orang pada Sungai Cheonggyecheon di Seoul, Korea Selatan. Aliran sungai itu mengalir membelah kota Seoul. Saking jernihnya, ikan-ikan yang berenang di sungai tersebut terlihat jelas.

Sungai Cheonggyecheon dibeton. Pinggir sungai menjadi lintasan lari atau berjalan kaki. Di sejumlah titik dibangun air terjun, air mancur, hingga delta-delta buatan untuk berbagai kegiatan. Rumput atau tanaman liar dibiarkan tumbuh alami. Tak ada sampah mengembang dan menumpuk di sungai itu (*Kompas*, 25/11/2018).

Namun, di awal perwujudan, rencana penataan Kali Malang, zona satu di Marga Jaya, Kota Bekasi, dipastikan molor dari target awal pengerjaan pada Februari atau Maret 2019.

Pembangunan terbentur pengerjaan proyek Strategis Nasional Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu atau Becakayu seksi IIA.

Menurut Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, penataan Kali Malang perlu diselaraskan dengan proyek Tol Becakayu. "Kami belum melihat finalisasi Tol Becakayu terakhir seperti apa. Makanya akan kami dahulukan silt yang ada di Unisma," kata Tri pada Maret 2019.

Penataan Kali Malang yang melintasi Kota Bekasi dengan panjang sekitar 5,3 kilometer direncanakan dibagi dalam empat zona, yaitu zona ekologis, zona selebrasi, zona edukatif, dan zona komersial.

Tentu kini warga Bekasi berharap sembari menanti perubahan wajah Kali Malang layaknya Sungai Cheonggyecheon di Korea Selatan.

Penataan itu akan menjadi penanda perubahan peradaban Kali Malang dari keruh, kotor, dan tercemar kembali menjadi lebih bersih, tertata, dan bermartabat.

Semoga!

Riwayat Kota

Judul	**Balai Besar: Percepat Pembangunan Waduk dan Normalisasi Sungai**	Tanggal	Senin, 29 April 2019
Media	Koran Tempo (Halaman, 17)		
Resume	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat untuk melanjutkan sejumlah program penanganan banjir di Ibu Kota. Berdasarkan pemetaan Balai, banjir yang melanda lebih dari 13 wilayah di Jakarta pada jumat lalu terjadi di kawasan yang dilintasi sungai yang belum dinormalisasi.		

Balai Besar: Percepat Pembangunan Waduk dan Normalisasi Sungai

Banjir pekan lalu tersebar di titik-titik sungai yang belum dinormalisasi.

Sepeda motor yang mogok akibat menerobos banjir di Jalan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat lalu.

Avit Hidayat
avit.hidayat@tempo.co.id

JAKARTA — Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat untuk melanjutkan sejumlah program penanganan banjir di Ibu Kota. Berdasarkan pemetaan Balai, banjir yang melanda lebih dari 13 wilayah di Jakarta pada Jumat lalu terjadi di kawasan yang dilintasi sungai yang belum dinormalisasi.

Kepala BBWSCC, Bambang Hidayah, mengatakan ada tiga program pengendalian banjir yang harus segera dituntaskan, yakni normalisasi sungai, pembuatan waduk, dan penyelesaian sodetan sungai. "Ketiga program itu penting untuk mengatasi banjir," kata dia, kemarin.

Bambang menerangkan, normalisasi Sungai Ciliwung sangat diperlukan agar kapasitas sungai bisa menampung banjir yang datang dari hulu. Masalahnya, proyek pengerukan dan pelebaran Sungai Ciliwung masih tersendat di sejumlah titik. Penyebabnya adalah lambannya pembebasan lahan oleh pemerintah DKI.

Normalisasi Ciliwung rencananya dilakukan di ruas sepanjang 19,5 kilometer, dari kawasan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan, hingga Manggarai, Jakarta Pusat. Balai Besar sejauh ini baru menuntaskan normalisasi sekitar 16 kilometer.

Program berikutnya, kata Bambang, adalah penuntasan pembangunan waduk kering di Ciawi dan Sukamahi, Kabupaten Bogor. Seperti halnya normalisasi sungai di wilayah Jakarta, pembangunan waduk di hulu Ciliwung itu juga terganjal oleh masalah pembebasan lahan. Balai juga mengingatkan agar pemerintah DKI melanjutkan pembebasan lahan untuk proyek sodetan Ciliwung dari kawasan Bidara Cina untuk mengalirkan air ke Kanal Banjir Timur. Sodetan itu dibutuhkan untuk mengurangi sekitar 10 persen debit air Ciliwung atau sekitar 60 meter kubik per detik.

Setelah mengadang-gadang program naturalisasi sungai sebagai alternatif dari normalisasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak menampik pentingnya pembangunan waduk-waduk di daerah hulu untuk mengatasi banjir di Ibu Kota. "Situasi seperti ini mengharuskan kami membangun lebih banyak waduk untuk penahan air sebelum masuk Jakarta," ujar Anies, akhir pekan lalu. "Kalau kami hanya membereskan di Jakarta, tidak ada artinya."

Anies berharap pembangunan waduk di Ciawi dan Sukamahi bisa rampung pada akhir tahun ini.

Kedua waduk itu, menurut dia, bisa mengurangi limpasan air Ciliwung hingga 30 persen. Senada dengan Balai Besar, menurut Anies, di kawasan hulu Ciliwung perlu ditambah satu atau dua waduk lagi agar banjir di wilayah Kabupaten Bogor tidak langsung terkirim ke wilayah Jakarta.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengkritik pernyataan terakhir Anies. Menurut dia, banjir di Jakarta sudah terjadi sejak dulu, sejak era Gubernur Ali Sadikin. "Itu dari dulu. *Bilangin* ke Gubernur Sadikin begitu. Jangan *ngomong* sekarang," ucapnya.

Bupati Bogor Ade Yasin juga meminta Anies tidak menyalahkan pihak lain atas bencana banjir yang melanda Ibu Kota. Pasalnya, selain DKI Jakarta, Kabupaten Bogor juga terkena banjir akibat curah hujan ekstrem dalam beberapa hari terakhir. "Enggak bisa saling menyalahkan, harus duduk bareng untuk mengatasinya," tuturnya.

Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Yusmada Faizal, membeberkan program lain yang diyakini bakal mengurangi banjir di Ibu Kota itu adalah pembangunan drainase vertikal (sumur resapan) yang sedang digalakkan pemerintah DKI. Sejauh ini, Dinas Sumber Daya Air telah membangun 203 titik drainase vertikal. "Semuanya dibangun di lahan publik, milik DKI," kata dia.

Adapun Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta tengah merampungkan 1.333 drainase vertikal di lima wilayah DKI. Dinas ini juga telah membangun 3.770 drainase vertikal di seluruh wilayah Ibu Kota. Drainase vertikal dibangun dengan kedalaman 30-40 meter.

● JULNIS FIRMANSYAH | LANI

Judul	**Masalah Pembebasan Lahan Hambat Proyek Waduk di Hulu Ciliwung**	Tanggal	Senin, 29 April 2019
Media	Koran Tempo (Halaman, 18)		
Resume	Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengungkapkan lambannya pembebasan lahan untuk proyek waduk kering di Sukamahi dan Ciawi menghambat penuntasan proyek pengendalian banjir itu. Padahal pembangunan waduk yang dimulai sejak akhir 2017 tersebut seharusnya rampung pada akhir tahun ini.		

Masalah Pembebasan Lahan Hambat Proyek Waduk di Hulu Ciliwung

Pembayaran ganti rugi lahan masih di bawah 35 persen.

ANTARA/YULIUS SATRIA WIJAYA

Pembangunan bendungan Ciawi-Sukamahi di Bogor, Jawa Barat, 1 April lalu.

Avit Hidayat
avit.hidayat@tempo.co.id

JAKARTA — Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengungkapkan lambannya pembebasan lahan untuk proyek waduk kering di Sukamahi dan Ciawi menghambat penuntasan proyek pengendalian banjir itu. Padahal pembangunan waduk yang dimulai sejak akhir 2017 tersebut seharusnya rampung pada akhir tahun ini.

Menurut Iwan, kedua bendungan besar itu sangat penting untuk menghalau limpasan air yang masuk ke Sungai Ciliwung. "Karena itu (dua bendungan) belum jadi, akhirnya banjir datang lagi, air terkirim lagi," kata dia, kemarin.

Pemerintah Kabupaten Bogor, kata Iwan, tak bisa berbuat banyak lantaran kedua bendungan tersebut merupakan proyek nasional yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Kami menunggu kebijakan pemerintah pusat untuk menuntaskan proyek itu," ujarnya.

Dua proyek bendungan itu berada di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Bendungan Sukamahi berada di Desa Sukamahi. Sedangkan bendungan Ciawi berada di Desa Cipayung, yang berdekatan dengan wilayah Kecamatan Ciawi.

Camat Megamendung, Hadi Jana, juga menerangkan bahwa pembebasan lahan di lokasi proyek bendungan Sukamahi dan Ciawi berjalan sangat lambat. Pembebasan terakhir dilakukan sekitar awal Maret lalu. "Sampai sekarang belum ada pembebasan lagi," ucapnya.

Rencananya, bendungan Sukamahi dibangun di lahan seluas 46,98 hektare dengan 640 bidang yang harus dibebaskan. Hingga akhir Maret lalu, lahan yang dibebaskan baru mencapai 81,1 persen atau sekitar 519 bidang. Dari jumlah itu, pemilik lahan yang sudah mendapat ganti rugi baru 34,36 persen.

Sedangkan bendungan Ciawi luasnya sekitar 78,35 hektare dengan 935 bidang lahan yang harus dibebaskan. Saat ini baru 31,42 hektare yang dibebaskan atau sekitar 324 bidang lahan. Total pemilik lahan yang sudah menerima pembayaran ganti rugi baru 34,7 persen.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Bambang Hidayah, tak menampik lambannya pembebasan lahan menjadi hambatan utama pembangunan kedua waduk tersebut. Menurut dia, seharusnya percepatan pembangunan fisik waduk Sukamahi dilakukan sejak awal April lalu.

Lambatnya pembebasan, menurut Bambang, terbilang wajar karena banyaknya bidang dan luas lahan yang harus dibebaskan. "Keterlambatan memang betul karena di seluruh Indonesia, semua proyek strategis nasional minta dibayar dalam waktu bersamaan dengan pembebasan lahan," tuturnya.

Waduk Sukamahi dan Ciawi menjadi bagian dari proyek nasional Kementerian PUPR yang pembangunannya direncanakan selesai pada akhir 2019, bersamaan dengan 13 waduk lainnya. Menurut Bambang, bila sudah selesai, daya tampung bendungan Sukamahi sebesar 1,6 juta meter kubik. Adapun daya tampung bendungan Ciawi mencapai 6,4 juta meter kubik. Secara teknis, kata Bambang, dengan adanya bendungan itu, debit air yang mengalir ke Jakarta bisa diturunkan hingga 30 persen.

Presiden Joko Widodo telah meninjau proyek bendungan Ciawi dan Sukamahi pada 26 Desember 2018. Kala itu, menurut Jokowi, pembangunan waduk Sukamahi baru mencapai 15 persen dan waduk Ciawi baru 9 persen. Namun Jokowi optimistis kedua proyek ini selesai sesuai dengan target, yaitu pada akhir 2019.

● ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Tak Cukup Dibendung di Hulu

PRESIDEN Joko Widodo pernah mengungkapkan bahwa pembangunan Waduk Sukamahi dan Ciawi di Bogor hanya merupakan upaya pengendalian banjir di kawasan hulu. Itu menjadi urusan pemerintah pusat. Namun, itu saja belum cukup. Sebab, setelah selesai, kedua waduk hanya bisa mengurangi ancaman banjir akibat meluapnya Sungai Ciliwung sekitar 30 persen.

Di bagian hilir, menurut Jokowi, pemerintah DKI Jakarta harus terus melakukan upaya mengatasi banjir di Ibu Kota. "Memang harusnya di hulu berjalan, di hilir berjalan. Di hulu seperti pembangunan waduk Sukamahi dan Ciawi, yang di hilir seperti normalisasi dan sodetan Ciliwung," kata Jokowi ketika mengunjungi proyek waduk Sukamahi pada Desember 2018.

Berikut ini rencana waduk Sukamahi dan Ciawi itu.

Waduk Ciawi

Jenis bendungan: *Dry dam*, untuk menahan dan mengatur aliran air ke Jakarta
Lokasi: Hulu Sungai Ciliwung di Desa Cipayung, Gadog, dan Sukakarya, Kecamatan Megamendung, serta di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Bogor

Luas area:

- Area konstruksi: 36,49 ha
- Area genangan: 29,22 ha
- Area green belt: 21,63 ha
- Area jalan masuk: 0,44 ha
- Area fasilitas umum: 0,88 ha

Total:
89,42 ha

Tinggi bendungan: 51 meter

Kontraktor: SNVT PJSA Ciliwung Cisadane dan Abipraya-Sacna KSO (pada 23 November 2016)
Nilai kontrak: Rp 757,8 miliar
Volume tampung: 6,45 juta meter kubik air

Waduk Sukamahi

Jenis bendungan: *dry dam*, untuk menahan dan mengatur aliran air ke Jakarta
Lokasi: Hulu Sungai Cisukabirus, Desa Sukamahi, Kecamatan Megamendung, Bogor

Luas area:

- Area konstruksi: 34,38 ha
- Area genangan: 5,23 ha
- Area green belt: 8,89 ha
- Area jalan masuk: 1,20 ha
- Area fasilitas umum: 0,88 ha

Total:
49,82 ha

Tinggi bendungan: 50 meter

Kontraktor: Wijaya Karya-Basuki KSO (ditandatangani pada 20 Desember 2016)
Nilai kontrak: Rp 436,97 miliar
Daya tampung: 1,68 juta meter kubik air

Judul	**Memotret Potensi Ekonomi di Pulau Sumatra**	Tanggal	Senin, 29 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 1)		
Resume	Pembangunan infrastruktur secara massif di berbagai wilayah diyakini akan membuka sumber-sumber perekonomian baru, salah satunya di Pulau Sumatra, wilayah paling barat Indonesia. Namun, potensi ekonomi ini belum terekam secara menyeluruh sehingga banyak pihak belum mengetahuinya. Oleh karena itu, sebagai media ekonomi terbesar di Tanah Air, Bisnis Indonesia menerjunkan Tim Jelajah Infrastruktur Sumatera 2019.		

MEMOTRET POTENSI EKONOMI DI PULAU SUMATRA

Rivki Maulana, Hafiyyan, & Fitri Sartina Dewi
redaksi@bisnis.com

Pembangunan infrastruktur secara masif di berbagai wilayah diyakini akan membuka sumber-sumber perekonomian baru, salah satunya di Pulau Sumatra, wilayah paling barat Indonesia.

Namun, potensi ekonomi ini belum terekam secara menyeluruh sehingga banyak pihak belum mengetahuinya. Oleh karena itu, sebagai media ekonomi terbesar di Tanah Air, *Bisnis Indonesia* menerjunkan Tim Jelajah Infrastruktur Sumatra 2019.

Fokus utama tim adalah memberikan laporan komprehensif terkait dengan peluang bisnis dan perekonomian di sejumlah provinsi yang menjadi lokasi proyek pembangunan infrastruktur.

Program Jelajah Infrastruktur Sumatra 2019 yang digelar *Bisnis Indonesia* untuk pertama kalinya ini akan dilakukan dalam beberapa tahap.

Pada tahap pertama, Tim Jelajah akan menyusuri ruas tol Bakauheni—Terbanggi Besar yang terbentang sepanjang 140,9 km. Perjalanan akan dilanjutkan ke Palembang dengan melewati sejumlah ruas tol yang akan beroperasi secara fungsional pada musim mudik tahun ini. Kegiatan ini dimulai hari ini, Senin (29/4) hingga Sabtu (4/5).

Tim Jelajah juga akan melaporkan secara langsung perkembangan terbaru mengenai proyek jalan tol Trans Sumatra dan beberapa infrastruktur lain, a.l. proyek ketenagalistrikan.

Bintang Perbowo, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), menuturkan ada 85 potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di sepanjang koridor Trans Sumatra, misalnya kawasan industri, bandara, pelabuhan, serta infrastruktur perairan.

Berdasarkan kajian perseroan, wilayah di sekitar jalan tol Trans Sumatra dengan radius lebih dari 50 km memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto Sumatra.

Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatra selalu di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, sumbangsih ekonomi Sumatra juga terus turun ke level 21,58% pada 2018.

"Dengan adanya jalan tol Trans Sumatra ini, diharapkan keadilan sosial dan pemerataan akan semakin nyata di seluruh wilayah karena distribusi barang dan jasa makin lancar," ujarnya.

Selain itu, keberadaan tol seperti ruas Bakauheni—Terbanggi Besar bakal memperlancar arus barang dan jasa karena waktu tempuh lebih singkat. Hal ini membawa dampak positif, terutama terhadap mobilitas masyarakat Sumatra.

Tol Trans Sumatra juga bakal mendorong industrialisasi di Sumatra dari sebelumnya yang bergantung kepada sektor komoditas. Saat ini, ada tiga kawasan ekonomi khusus (KEK) yang sudah beroperasi seluas 6.958 hektare, yakni KEK Arun, KEK Sei Mangkei, dan KEK Galang Batang.

Tim Jelajah juga akan memotret perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha pascatersambungnya ruas tol Trans Sumatra. Tentunya, aneka ragam wisata kuliner di lintas tol Trans Sumatra juga akan diulas.

Program Jelajah Infrastruktur Sumatra 2019 tahap pertama ini didukung oleh PT Hutama Karya (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). ■

Judul	**META Susun Studi Kelayakan Proyek**	Tanggal	Senin, 29 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	PT Nusantara Infrastructure Tbk. Telah mendapat izin dari Kementerian PUPR untuk menyusun studi kelayakan pada ruas tol layang yang diprakarsainya yakni Cikunir – Ulujami.		

▸ TOL CIKUNIR–ULUJAMI

META Susun Studi Kelayakan Proyek

Bisnis, JAKARTA — PT Nusantara Infrastructure Tbk. telah mendapat izin dari Kementerian PUPR untuk menyusun studi kelayakan pada ruas tol layang yang diprakarsainya yakni Cikunir—Ulujami.

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

General Manager Corporate Affairs PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META) Deden Rochmawaty mengatakan bahwa izin studi kelayakan proyek tersebut untuk perseroan sudah diterbitkan sejak Desember 2018.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, prakarsa pengusahaan ruas tol Cikunir—Ulujami sepanjang 28,86 kilometer diajukan pada Juni 2018. Rencananya, ruas tol ini akan dibangun dengan konstruksi melayang.

"Kami sudah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan FS [*feasibility study*] ruas Cikunir—Ulujami yang akan masuk dalam jaringan Jakarta Outer Ring Road III," kata Deden kepada *Bisnis*, Jumat (26/4).

Izin untuk melaksanakan studi kelayakan merupakan salah satu tahap yang harus ditempuh inisiator sebelum mendapatkan izin prakarsa pembangunan jalan tol.

Persetujuan prakarsa kemudian akan berlanjut pada tahap pelelangan investasi. Sebagai pemrakarsa, peluang untuk memenangi lelang amat besar.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemrakarsa memiliki keistimewaan dalam proses pelelangan, yaitu hak menyamakan penawaran atau *right to match*.

▸ **Pemrakarsa mendapat bobot penilaian lebih tinggi 10% dibandingkan dengan peserta lain.**

Selain itu, pemrakarsa juga mendapat bobot penilaian lebih tinggi 10% dibandingkan dengan peserta lain.

Dalam prakarsa pengusahaan ruas tol layang Cikunir—Ulujami, META bermitra dengan tiga badan usaha, yaitu PT Triputra Utara Selaras, PT Adhi Karya Tbk., dan PT Acset Indonusa Tbk. META bersama Triputra menjadi pemimpin konsorsium dengan porsi saham 85%.

Menurut Deden, perseroan juga sudah mendapat komitmen dari calon penyandang dana untuk mendanai proyek senilai Rp22,50 triliun ini.

PT Indonesia Infrastructure Finance, yang juga pemilik 10% saham META bakal memberi beberapa alternatif skema pembiayaan jika konsorsium telah mendapat persetujuan prakarsa dari Kementerian PUPR.

Sebelumnya, Direktur META Danni Hasan mengemukakan bahwa proyek ruas tol Cikunir—Ulujami sangat prospektif dalam pengembangan bisnis perseroan. Lalu lintas harian rata-rata pada seksi itu akan mencapai 400.000 kendaraan/hari sebab pada jalur arteri saja, kendaraan yang melintas sudah mencapai 200.000/hari.

"Ini cukup prestisius karena berada di wilayah Jakarta meskipun memang sangat menantang karena kami akan membangun jalan tol ketiga di wilayah JORR," tuturnya, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol, proposal konsorsium calon pemrakarsa ruas tol Cikunir—Ulujami diterima pada 8 Juni 2018.

Konsorsium sudah melakukan pemaparan dan memproses sejumlah dokumen persyaratan prakarsa untuk mendapatkan izin prinsip dari Menteri PUPR.

Izin prinsip itu bertujuan untuk memantapkan studi kelayakan proyek sebelum dokumen dievaluasi kembali oleh pemerintah. Evaluasi akhir dilakukan untuk menetapkan kelayakan proyek tersebut.

Dalam pembangunan proyek prakarsa, badan usaha pemenang lelang investasi harus menanggung biaya tanah yang akan dibebaskan.

Menurut Danni, pembebasan lahan pada proyek ini dinilai tidak terlalu signifikan mengingat sebagian besar proyek akan dibangun melayang.

JORR KIAN MEMANJANG

Jakarta siap mendapat tambahan jalan tol baru. Pada 2019, jaringan jalan tol lingkar luar Jakarta II atau Jakarta Outer Ring Road II siap beroperasi. Tak cukup sampai di situ, konsorsium yang digalang PT Nusantara Infrastructure Tbk. atau META juga siap membangun ruas Cikunir–Ulujami yang masuk dalam jaringan JORR III.

Keberadaan jalan tol Cikunir–Ulujami nantinya melengkap jaringan jalan tol lingkar luar yang saat ini sudah beroperasi, di JORR I (64 kilometer) dan JORR II (110,40 kilometer).

Nama proyek:
Jalan tol Cikunir–Ulujami

Panjang: 22,86 kilometer

Investasi: Rp22,50 triliun

Pengusul: PT Nusantara Infrastructure Tbk., PT Adhi Karya Tbk., PT Triputra Utama Selaras, PT Acset Indonusa Tbk.

Sumber: *PT Nusantara Infrastructure Tbk., diolah*
BISNIS/HUSIN PARAPAT

Di sisi lain, konstruksi tol layang membutuhkan investasi lebih besar dibandingkan dengan tol reguler.

PENYUMBANG UTAMA

Hingga kini, pengusahaan jalan tol masih menjadi penyumbang utama pendapatan META. Sepanjang 2018, pengusahaan jalan tol menyumbang 64,61% terhadap total pendapatan sebanyak Rp782 miliar. Pendapatan lain disumbang dari sektor telekomunikasi (17,18%), air minum (11,12%), dan energi (7,08%).

Hingga saat ini, META memiliki tiga konsesi jalan tol yaitu Pondok Ranji—Pondok Aren, Tallo—Bandara Hasanuddin, dan Pelabuhan Soekarno Hatta—Pettarani.

Sepanjang 2018, ruas Pondok Ranji—Pondok Aren masih menjadi penyumbang pendapatan di sektor jalan tol, yakni sebesar Rp211,61 miliar.

Di samping tiga ruas dengan kepemilikan mayoritas, META juga telah menambah kepemilikan saham di PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) menjadi 35%. JLB merupakan pemegang konsesi ruas Kebon Jeruk—Penjaringan yang merupakan bagian dari JORR.

Sementara itu, pada ruas jalan tol yang belum beroperasi, META masih fokus mengerjakan konstruksi jalan tol layang A.P. Pettarani di Makassar sepanjang 4,30 kilometer. Jalan tol ini diharapkan beroperasi pada 2020.